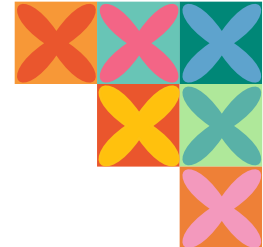


Advertorial

RAPBN 2026

Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi





Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Kondisi Perekonomian	3
Target Pembangunan	4
Fokus Kebijakan Fiskal 2026.....	5
Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6
Postur APBN.....	7

BELANJA NEGARA 8

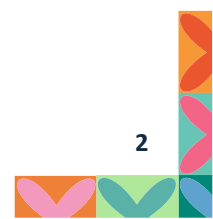
Belanja Pemerintah Pusat	9
Anggaran Tematik	11
Transfer ke Daerah	24

PENDAPATAN NEGARA 25

Penerimaan Perpajakan.....	26
Penerimaan Pajak.....	27
Kepabeanan dan Cukai	28
Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	30

PEMBIAYAAN & DEFISIT ANGGARAN 31

Pembiayaan Anggaran	32
Pembiayaan Investasi	33
Pembiayaan Lainnya	34
Pengelolaan Risiko Fiskal	35



Kondisi Perekonomian



Kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan besar selama delapan dekade menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk bersatu menjaga kedaulatan, menyejahterakan rakyat, dan memajukan Indonesia.

Berlandaskan amanah Pembukaan UUD 1945 dan semangat Pasal 33, pemerintah memperkuat peran strategis APBN sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi di tengah dinamika perekonomian global yang terus meningkat.



Indonesia berhasil meneguhkan posisinya di panggung dunia dengan diplomasi yang tangguh, memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membangun kemitraan setara dengan negara lain. Keberhasilan menekan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, menuntaskan CEPA dengan Uni Eropa, serta aktif di BRICS, G20, OECD, dan ASEAN menjadi bukti kiprah strategis yang membuka peluang pasar, memperkuat hubungan ekonomi, dan mengokohkan peran Indonesia dalam kerja sama internasional.



Di tengah tingginya risiko global, Indonesia memiliki ketahanan fundamental ekonomi yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai kisaran 5 persen dibandingkan tahun lalu, terutama didukung oleh terjaganya konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang tumbuh tinggi.



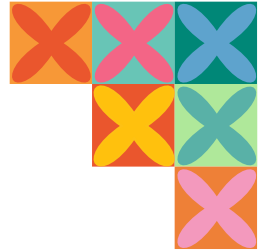
Dalam 10 bulan Kabinet Merah Putih, berbagai program strategis mulai menunjukkan hasil nyata, mulai dari pemenuhan gizi masyarakat, layanan kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan, hingga penyediaan perumahan, penguatan koperasi desa, optimalisasi lahan pangan, serta modernisasi pertahanan. Seluruh capaian ini menjadi modal penting untuk percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.



Untuk mendukung transformasi struktural, Pemerintah melakukan langkah strategis antara lain diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, penguatan sektor industri, pasar ekspor dan konektivitas global, serta posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*).



Berpijak pada proyeksi global, stabilitas ekonomi domestik, dan capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi 2026 akan terus dilanjutkan disertai penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran, serta peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja formal demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan



Target Pembangunan 2026



**Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)**

4,44 - 4,96



**Indeks Modal
Manusia**

0,57



**Tingkat
Kemiskinan(%)**

6,5 - 7,5



**Kemiskinan
Ekstrem(%)**

0-0,5



Gini Ratio

0,377 - 0,380



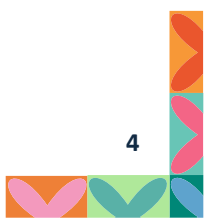
**Indeks
kesejahteraan
petani**

0,7731



**Proporsi penciptaan
lapangan pekerjaan
formal (%)**

37,95



Fokus Kebijakan Fiskal

2026



Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan.



Strategi jangka pendek difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi melalui diplomasi dan perluasan pasar, perlindungan dunia usaha dan daya beli, serta menjaga kesehatan APBN dengan pengelolaan defisit, pembiayaan berkelanjutan, dan optimalisasi pendapatan negara.

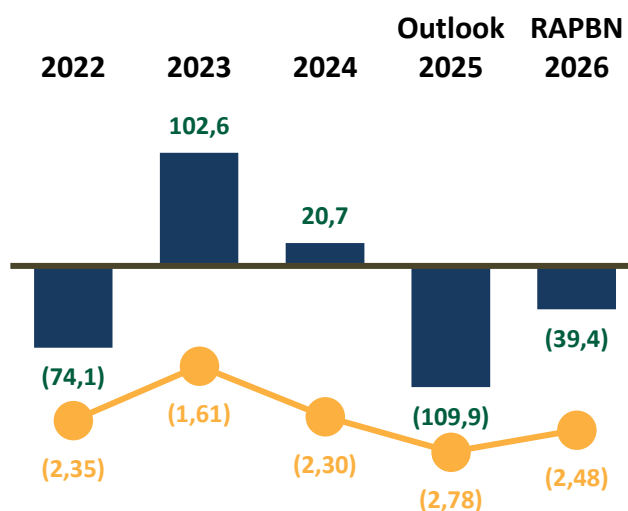


Strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) Makan Bergizi Gratis (MBG); (4) program pendidikan bermutu; (5) program kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.



APBN 2026 Sehat, Akseleratif, dan Suportif

- Keseimbangan Primer (triliunRupiah)
- Defisit thd PDB (%)



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

RAPBN 2026



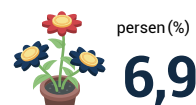
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi, investasi, ekspor, dan transformasi berkelanjutan, dengan antisipasi risiko global melalui kebijakan adaptif.



Inflasi

Inflasi di tahun 2026 diperkirakan masih tetap terjaga, ditopang sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia



Tingkat Bunga SBN 10 Tahun

Pasar SBN Indonesia di topan oleh ketahanan ekonomi domestik yang terus membaik, meskipun menghadapi tekanan dari ketidakpastian global



Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika global yang penuh ketidakpastian, meskipun volatilitas cenderung mereda disebabkan oleh pasar keuangan global yang telah mengantisipasi arah kebijakan perdagangan ekonomi AS



Harga Minyak Mentah

Asumsi harga minyak mentah akan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, kebijakan OPEC+, serta semakin berkembangnya transportasi berbasis *non-fossil fuel*

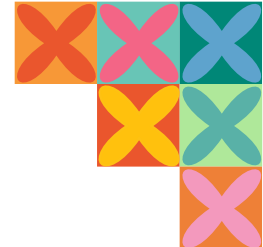


Lifting Minyak



Lifting Gas

Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik, dan pelaksanaan *enhance oil recovery*



Pendapatan Negara

Rp3.147,7 T

Mencapai 12,24% dari PDB melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan adaptif terhadap perekonomian global

- **Perpajakan** **Rp2.692,0 T**
- **PNBP** **Rp455,0 T**
- **Hibah** **Rp0,7 T**



Belanja Negara

Rp3.786,5 T

Fokus, efisien dan produktif mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan

- **Belanja Pemerintah Pusat** **Rp3.136,5 T**
- **Transfer Ke Daerah** **Rp650,0 T**



Pembiayaan Anggaran

Rp638,8 T

antara lain :

- **Pembiayaan Investasi** **Rp(203,1) T**
- **Pemberian Pinjaman** **Rp(0,4) T**
- **Pembiayaan Lainnya** **Rp60,4 T**



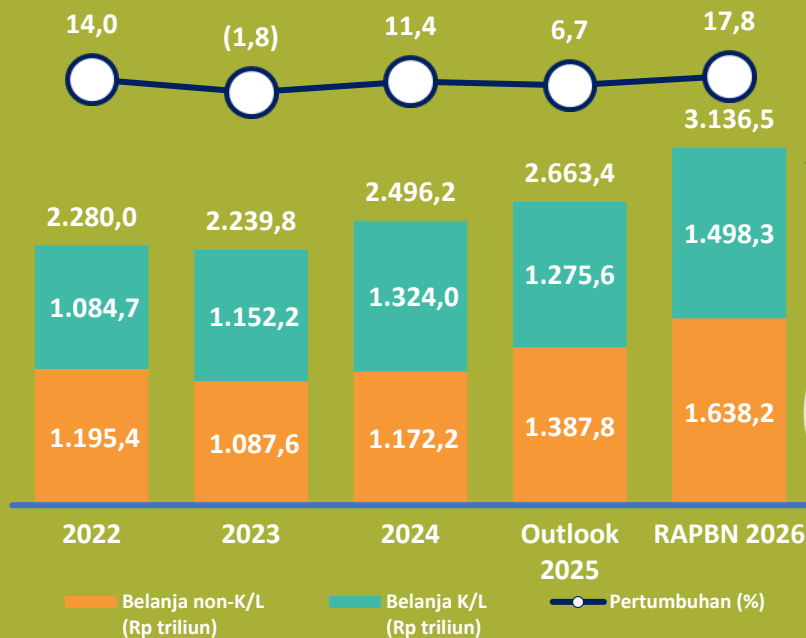


Belanja Negara



Belanja Pemerintah Pusat

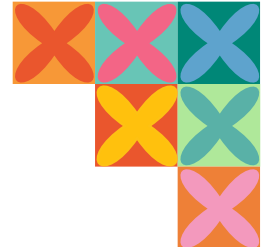
Kualitas belanja ditingkatkan melalui efisiensi dan efektivitas untuk keberlanjutan pembangunan



Kebijakan a.l

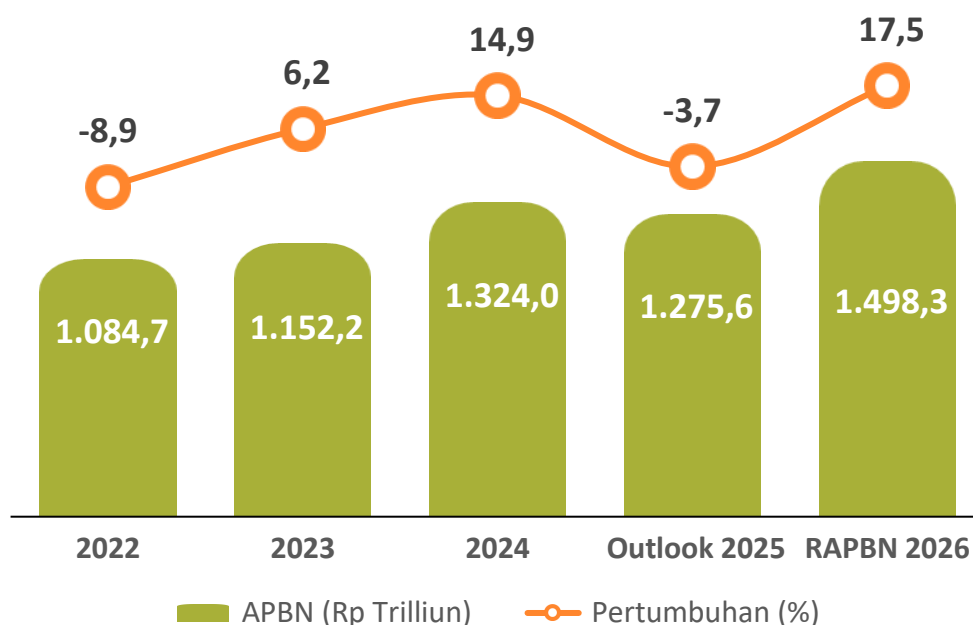
- Optimalisasi belanja untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional
- Akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Reformasi subsidi dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan





Belanja Kementerian/Lembaga

Rp1.498,3 T



Kebijakan khusus a.l

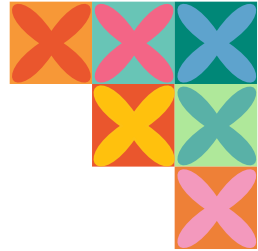
Penguatan Bidang Agenda Pembangunan: (1) Ketahanan pangan; (2) Ketahanan energi; (3) Pendidikan; (4) Kesehatan; (5) Pertahanan semesta; (6) perlintas; dan (7) percepatan investasi dan perdagangan global



Kebijakan Umum a.l

- Kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel
- Menyelaraskan Belanja KL dengan tema RKP dan kebijakan fiskal 2026
- Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan
- Mengoptimalkan belanja sebagai stimulus perekonomian
- Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD
- Mengutamakan penggunaan komponen/produk dalam negeri





Anggaran Ketahanan Pangan



Tantangan

-  Produksi pangan kurang optimal
-  Perubahan iklim mengganggu produksi dan memicu volatilitas harga pangan
-  Ketidakstabilan pasar menyebabkan kenaikan harga serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan
-  Peningkatan biaya produksi
-  Keterbatasan kapasitas dan permodalan petani/nelayan

Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Mendorong Produktivitas, Menjaga Stabilitas Harga, dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani & Nelayan



Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian



Modernisasi sistem pertanian/perikanan



Penguatan infrastruktur pertanian



Pembangunan pergaraman nasional



Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan



Penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif



Bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan



Akses permodalan dan perlindungan usaha

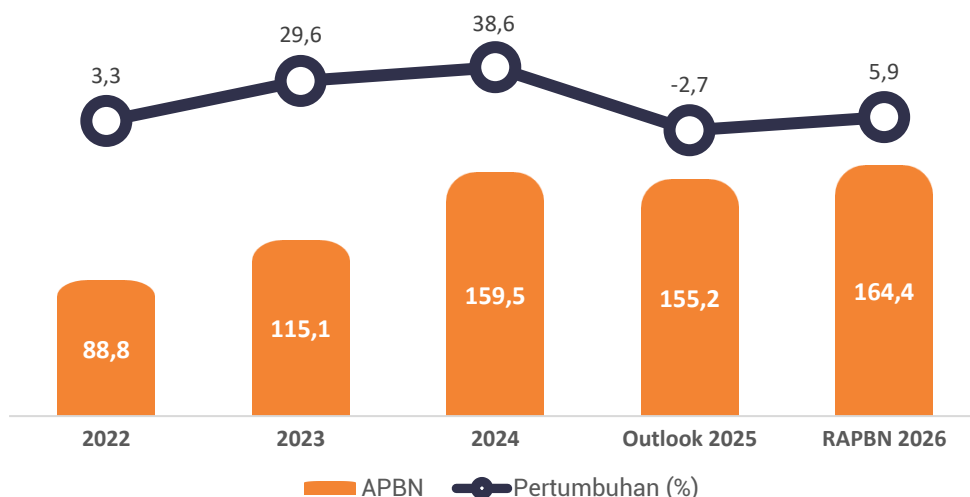




Anggaran Ketahanan Pangan

Rp164,4 T

Mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/nelayan



Target Output Prioritas

- ✓ Pengembangan kawasan padi seluas 2.127.000 ha
- ✓ Cetak sawah seluas 250.000 ha
- ✓ Optimasi lahan pertanian seluas 300.000 ha
- ✓ Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) prapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 36.958 unit
- ✓ Bantuan sarana pasca panen tanaman pangan sebanyak 2.978 unit
- ✓ Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,62 juta ton
- ✓ Pembangunan bendungan (*on-going*) sebanyak 15 unit
- ✓ Pengembangan jaringan irigasi sejumlah 104.000 ha
- ✓ Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km
- ✓ Gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat
- ✓ Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung
- ✓ Revitalisasi Lahan Garam seluas 1.000 ha
- ✓ Bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 137,6 juta ekor
- ✓ Bantuan alat penangkap ikan sebanyak 46,5 ribu unit



Ketahanan Energi

Peningkatan Lifting Migas, Stabilisasi Harga, dan Pengembangan EBT

Kebijakan

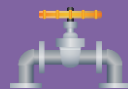
1. Peningkatan *lifting* migas.
 - Memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif tetapi belum secara resmi ditutup
 - Optimasi sumur-sumur produktif
 - Mengeksplorasi cadangan minyak baru.
2. Mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
 - Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan
 - Pengembangan Program Biodiesel
3. Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran
 - Mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat, dengan memerhatikan kondisi daya beli masyarakat



Output Tahun 2026



Insentif Perpajakan terkait ketahanan energi



Pembangunan transmisi pipa gas bumi



Pemberian bantuan *converter kit* kepada petani



Insentif biodiesel



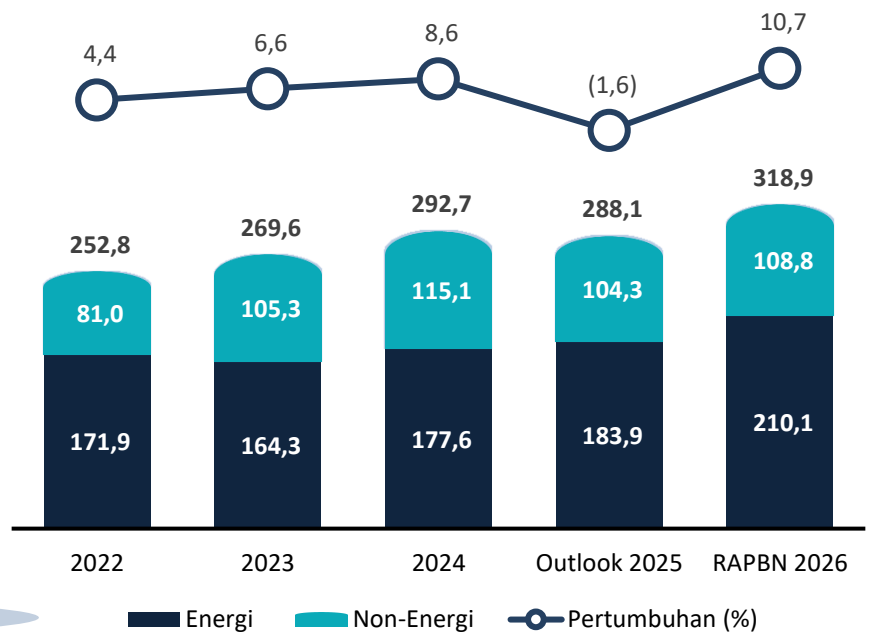
Pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan



Penyaluran subsidi energi dan kompensasi

Anggaran Subsidi

Diarahkan Untuk Stabilisasi Harga dan Menjaga Daya Beli, serta Mendukung UMKM



Kebijakan Subsidi



Subsidi tetap untuk BBM solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, serta melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran



Meningkatkan daya saing usaha bagi UMKM, petani, dan nelayan melalui subsidi bunga KUR dan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



Subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan DTSEN



Mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik



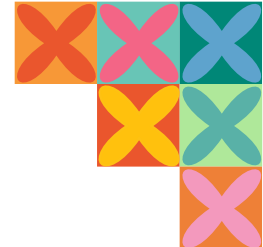
Subsidi pupuk kepada kelompok tani dan pembudidaya ikan untuk komoditas prioritas



Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat



Reformasi kebijakan energi tepat sasaran berbasis DTSEN



Anggaran Pendidikan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Tantangan Pendidikan Indonesia



Indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara ASEAN



Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang belum meningkat signifikan)



Kebutuhan sarpras serta tenaga pengajar berkualitas



Tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi



Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan



Peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah)



Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan



Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD



Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif dan afirmatif

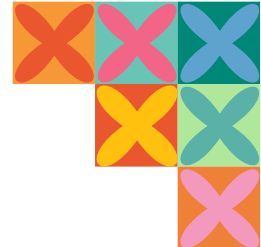


Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi



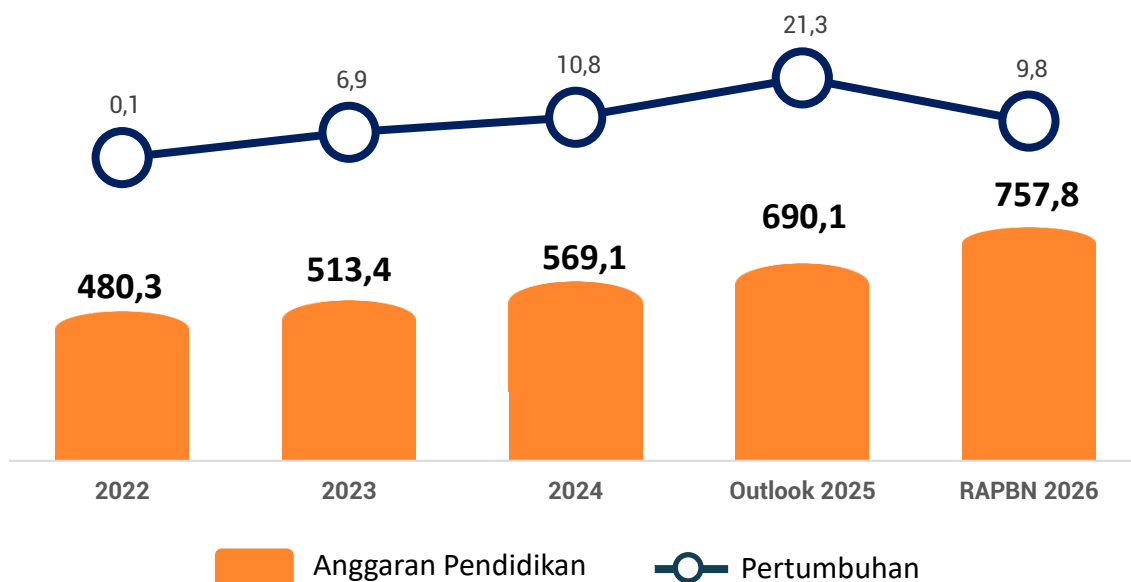
Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi serta revitalisasi sekolah dan madrasah





Anggaran Pendidikan

Rp757,8 T



Anggaran Pendidikan Tahun 2026

Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l.



- PIP kepada **21,1 juta** siswa
- KIP Kuliah kepada **1,2 juta** mahasiswa
- TPG Non PNS untuk **754,7 ribu** guru non PNS
- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk **82,9 juta** penerima

Melalui Transfer ke Daerah, a.l.



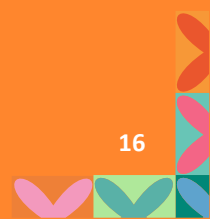
- BOS untuk **43,5 juta** siswa
- BOP PAUD untuk **6,2 juta** peserta didik
- TPG ASND untuk **1,6 juta** guru daerah
- TAMSIL ASND untuk **22,7 ribu** guru daerah yang belum bersertifikasi



Melalui Pembiayaan, a.l.



- Pemberian beasiswa melalui LPDP kepada 55.492 orang (kumulatif)
- Beasiswa Gelar dan Non Gelar kerjasama LPDP dengan Kemendikbudristek dan Kemenag
- Pendanaan Riset.



Anggaran Kesehatan

Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas



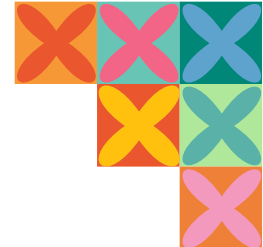
Tantangan Kesehatan Indonesia

- Peningkatan proyeksi biaya kesehatan akibat *aging population* di Indonesia
- Ketimpangan fasilitas dan distribusi SDM Kesehatan antar wilayah, khususnya di daerah 3T
- Kapasitas layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit perlu ditingkatkan
- Pencegahan dan penurunan prevalensi stunting yang belum optimal.
- Tingginya jumlah penyakit menular (a.l. TB) dan tidak menular (a.l. diabetes melitus dan obesitas), serta munculnya masalah kesehatan baru (a.l. mental health)
- Dampak perubahan iklim yang berimbas pada penurunan kualitas kesehatan, penyakit katastropik, risiko terhadap resistensi antimikroba
- Gaya hidup pasif (*sedentary*) yang dapat memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat.

Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia

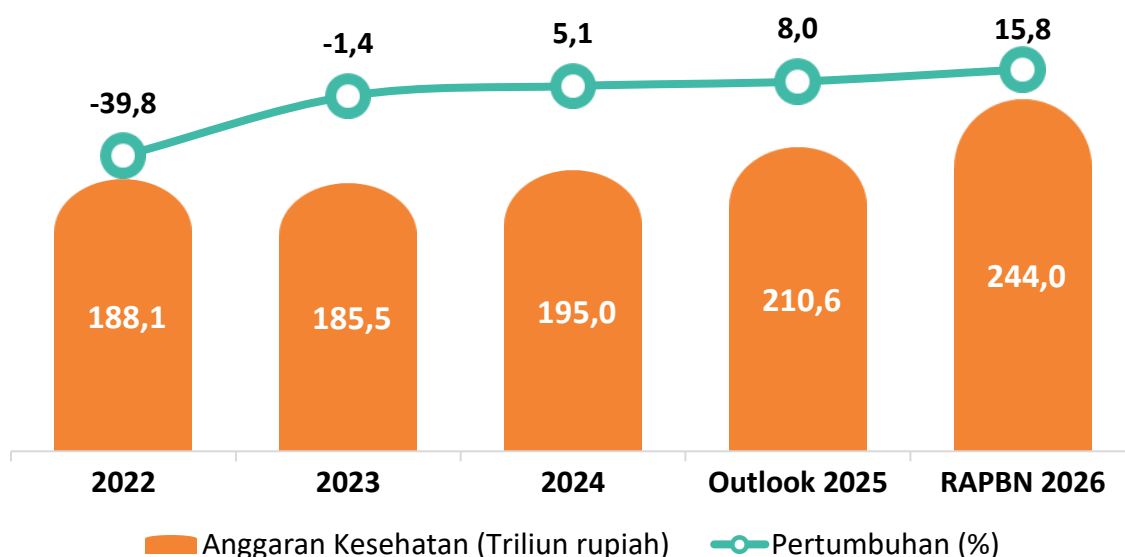
- Peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan
- Peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Percepatan penuntasan Tuberkulosis (TB)
- Peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah
- Pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan
- Pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*





Anggaran Kesehatan

Rp244,0 T



Target Output Prioritas

- + Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa
- + Bantuan makan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil sehat, 2,6 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita sehat
- + Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa 7,8 ribu produk (pusat) dan 1,1 ribu produk (daerah)
- + Penugasan khusus tenaga medis dan kesehatan pada Fasyankes Primer 2,3 ribu orang dan 62 orang di wilayah Papua
- + Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan untuk 7,5 ribu orang dan Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat untuk 90 orang
- + Keluarga dengan baduta yang Mendapatkan fasilitas dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK sejumlah 93,8 ribu keluarga
- + Penguatan ±26 Puskesmas berupa pembangunan puskesmas rusak berat
- + Penguatan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU) dan kesehatan ibu dan anak di ±364 RSUD
- + Pemanfaatan BOK di 10.224 puskesmas, 545 daerah, dan untuk 2.169 dokter
- + Program Bangga Kencana di 6.435 balai penyuluhan KB.



Anggaran Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Kebijakan

- Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pengembangan sektor produksi
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM dan penguatan sistem pengawasan
- Perluasan akses perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi UMKM dan Koperasi
- Mendorong peningkatan mutu produk dan penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif
- Inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan



Output Strategis

- Fasilitasi dan pembinaan akses pembiayaan UMKM
- Fasilitasi dan pembinaan desa
- Pemberdayaan pelaku usaha dalam mendukung program MBG
- Penyaluran kredit KUR
- Penempatan dana Pemerintah dan penyaluran pemberian pinjaman melalui Himbara



Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)

Manfaat

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;
- Menjaga harga kebutuhan pokok.
- Meningkatkan nilai tukar petani

Fasilitas Pinjaman KDMP



Bunga pinjaman
6% p.a



Plafon Pinjaman
hingga Rp3 M



Masa tenggang
6-8 bulan



Tenor
6 Tahun



Apotek Desa



Gerai Kantor
Koperasi



Gerai Cold Storage



Gerai Sembako



Gerai Usaha



Logistik



Gerai Unit Usaha
Simpan Pinjam



Kegiatan Usaha Lain
(Pupuk, LPG, dll)



Gerai Klinik Desa



Anggaran Pertahanan Semesta

Kebijakan

- ✚ Modernisasi/harwat Alutsista/Almatsus Pengembangan industri pertahanan dalam negeri
- ✚ Memperkuat komponen utama, cadangan dan pendukung
- ✚ Pencegahan/penindakan terorisme, siber, sandi, dan sinyal
- ✚ Pencegahan narkoba dan obat terlarang
- ✚ Pencegahan/penindakan korupsi, dan pencucian uang
- ✚ Pencegahan/penindakan pidana umum, khusus, dan PTUN



Output Strategis

Pertahanan Rp185,0 Triliun, a.l



Harwat KRI, KAL,
Alpeng



Pengadaan/
penggantian
pesawat



Pengadaan/
harwat Ranpur/
Rantis



Pengadaan
sarpras
pertahanan



Penambahan
Batalyon &
Kodam



Dukungan
alutsista/
non-alutsista

Ketertiban dan Keamanan Rp179,4 Triliun, a.l



Pengamanan
wilayah
perbatasan



Harwat
Almatsus



Pencegahan
terorisme dan
kejahatan siber

Hukum (Kejaksaan, HAM, Peradilan Rp60,4 Triliun, a.l



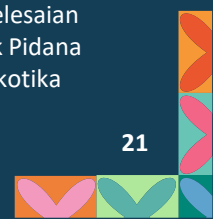
Penindakan
Tindak Pidana
Umum, Khusus
dan PTUN



Penindakan
Korupsi dan
Pencucian
Uang



Penyelesaian
tindak Pidana
Narkotika



Anggaran Perlindungan Sosial

Pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan



Tantangan Perlinsos



Penyaluran yang masih sepeuhnya sasaran.

program belum tepat



Program pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang masih terbatas.

Arah Kebijakan Perlinsos



Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pemanfaatan DTSEN.



Mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan.



Penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan.

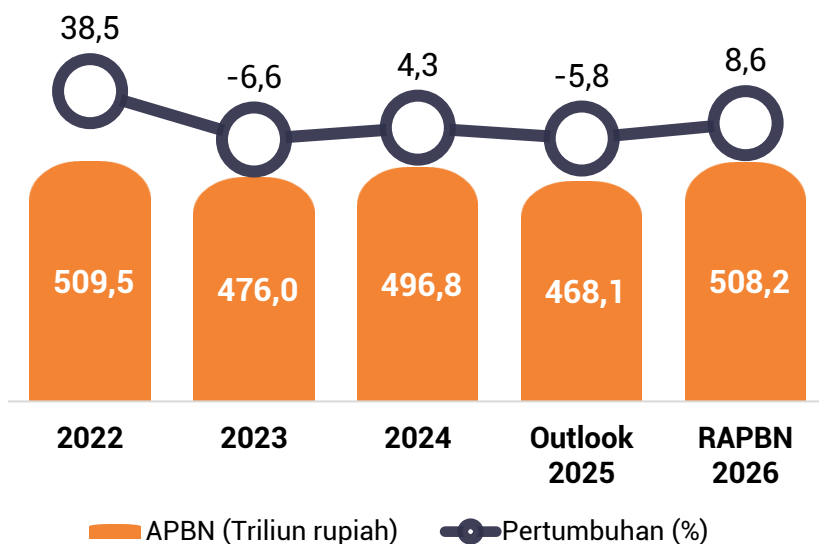


Mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.



Anggaran Perlindungan Sosial

Rp508,2 T



Target Output Prioritas



Program Keluarga Harapan (PKH)
untuk 10,0 juta KPM



Penyaluran **Subsidi Jenis BBM Tertentu**
sebanyak 19.162.5 ribu kiloliter



Program Bansos Sembako
untuk 18,3 juta KPM



Penyaluran **Subsidi LPG Tabung 3 kg**



Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)
bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak yatim piatu (YAPI), penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak 75,3 ribu orang



Penyaluran **Subsidi Bunga KUR** untuk 6,1 juta debitur



Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana
melalui BNPB



Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
untuk 1,8 juta KPM di desa

keterangan: Program Perlisos termasuk penyaluran bansos melalui PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI JKN

Transfer Ke Daerah

diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik di daerah serta mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien



Transfer ke Daerah utamanya untuk Pemenuhan Belanja Pokok Pemerintah Daerah

Rp650,0 T

DBH 45,1 T

DAU 373,8 T

DAK 155,1 T

Otsus
DIY 13,6 T

Dana
Desa 60,6 T

DIF 1,8 T



Gaji dan Tunjangan
Melekat ASND



Belanja Operasional
Kantor



Belanja Pelayanan
Publik

Kebijakan TKD a.l.



Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan



Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*



menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (*vertical balance*) serta antardaerah (*horizontal balance*)



Meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan



Dana Desa untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih



Dukungan untuk program prioritas pemerintah dan belanja pemerintah daerah utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat ASND, operasional kantor, dan pelayanan publik





Pendapatan Negara



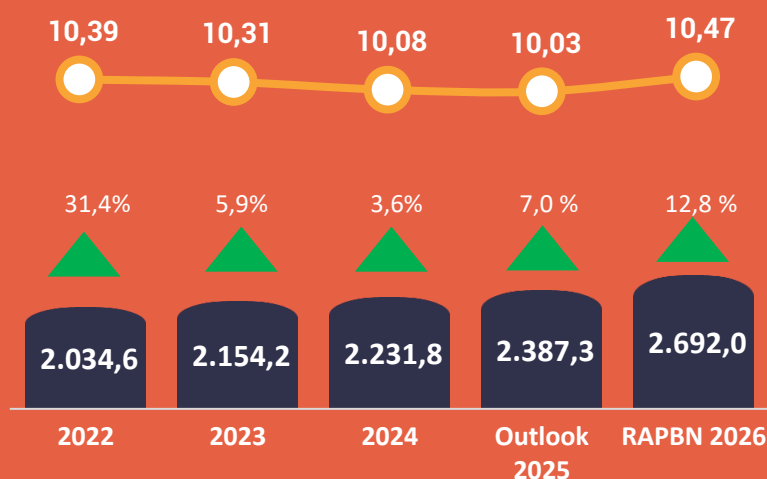
Penerimaan Perpajakan

Rasio PDB

Rp2.692,0 T

10,47%

Perpajakan 2022-2026



■ Perpajakan ● % thd PDB ▲▼ Kenaikan/Penurunan

Kebijakan

- Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- Pengawasan berbasis teknologi informasi, sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum
- Keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional
- Insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur

Penerimaan Pajak

Rp2.357,7 T

Dipengaruhi proyeksi ekonomi domestik disertai kebijakan *Joint Program* dalam analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan Perpajakan

Kepabeanan & Cukai

Rp334,3 T

Didukung kebijakan cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar serta upaya Penegakan Hukum untuk Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Penyelundupan



Penerimaan Pajak

Rp2.357,7

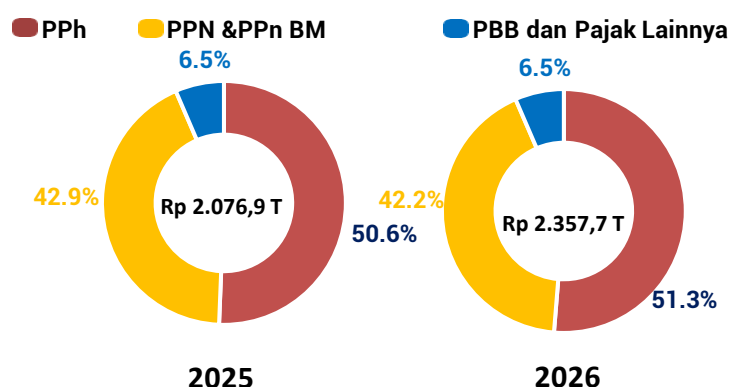
Dipengaruhi proyeksi ekonomi domestik disertai kebijakan *Joint Program* dalam analisis data, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum

Kebijakan Teknis,

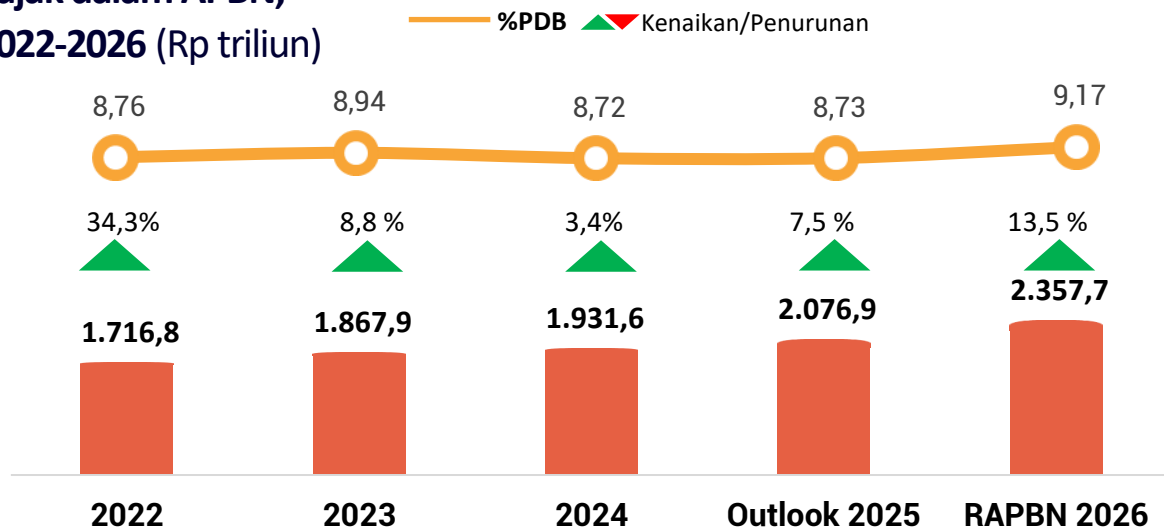
antara lain:

- ✓ Penggunaan Core Tax dan Compliance Risk Management (CRM)
- ✓ *Joint Program*
- ✓ Insentif perpajakan yang terukur dan terarah
- ✓ Optimalisasi pelaksanaan UU HPP dan penegakan hukum
- ✓ Penagihan piutang pajak

Kontribusi Per Jenis Pajak



Pajak dalam APBN, 2022-2026 (Rp triliun)



Penerimaan PPh, dipengaruhi:

- ✓ Proyeksi pertumbuhan ekonomi
- ✓ *joint program* serta peningkatan efektivitas pengawasan fokus kepada HWI dan WP grup

Penerimaan PPN & PPnBM, dipengaruhi:

- ✓ Efektivitas implementasi UU HPP
- ✓ Konsumsi domestik

PBB dan Pajak Lainnya, dipengaruhi:

- ✓ Objek pajak PBB-P3 dan fluktuasi harga komoditas
- ✓ Aktivitas transaksi bermeterai
- ✓ Kemudahan pembayaran WP



Kepabeanan & Cukai

Rp334,3 T

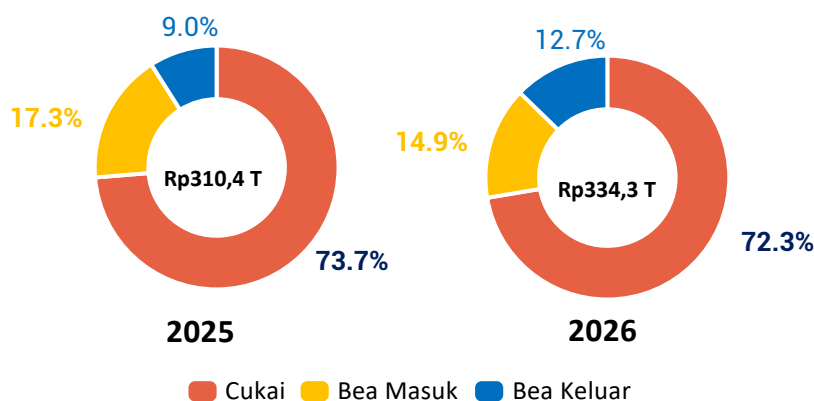
Dipengaruhi Kebijakan CHT, Ekstensifikasi BKC, Intensifikasi Bea Masuk (BM), Perluasan basis Bea Keluar (BK), serta Penegakan Hukum

Kontribusi terhadap total Kepabeanan dan Cukai

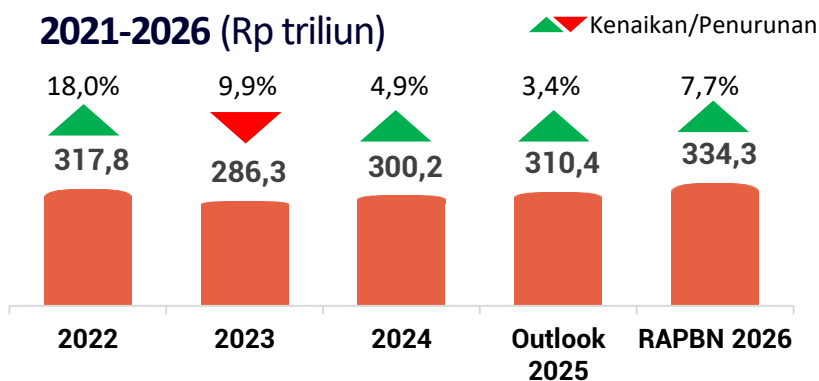
- Cukai
- Bea Masuk
- Bea Keluar

Kebijakan Teknis, antara lain Mendukung:

- ❑ **Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan** a.l Fasilitas Kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi.;
- ❑ **Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif:** Pencegahan dan pemberantasan BKC ilegal dan NPP
- ❑ **Penerimaan Negara:** Kebijakan CHT, intensifikasi BM, dan ekstensifikasi BK



Kepabeanan dan Cukai dalam APBN, 2021-2026 (Rp triliun)



Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai mencapai Rp241,8 T (72,3 persen dari total kepabeanan dan cukai) yang didorong upaya Penegakan Hukum untuk Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal

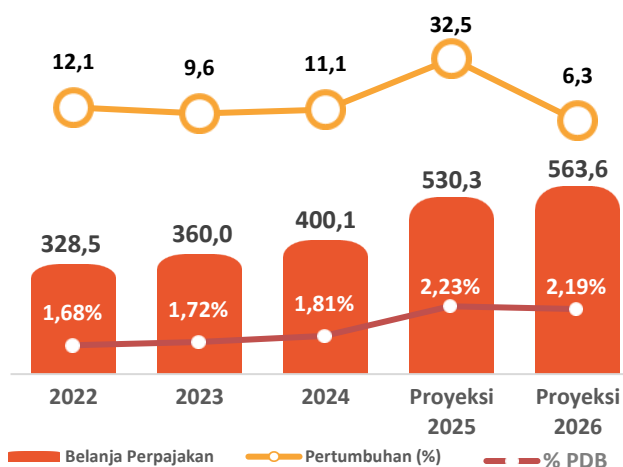
Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk mencapai Rp49,9 T (14,9% total penerimaan BC), dipengaruhi proyeksi aktivitas impor terutama komoditas utama

Bea Keluar mencapai Rp42,6 T (12,7% total penerimaan BC), dipengaruhi harga CPO dan Kebijakan Bea Keluar (BK) mendukung Hilirisasi Produk

Insentif Perpajakan

Belanja Perpajakan diarahkan untuk:



- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** a.l. melalui PPN dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, angkutan umum, dan hasil perikanan
- Mendukung UMKM** a.l. melalui Fasilitas PPh final dan PPN tidak wajib dipungut bagi pengusaha kecil (omzet < Rp4,8 miliar/tahun)
- Menarik Investasi & Dunia Usaha** a.l. melalui *tax holiday* dan *tax allowance*

Insentif Pajak untuk Mendukung Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

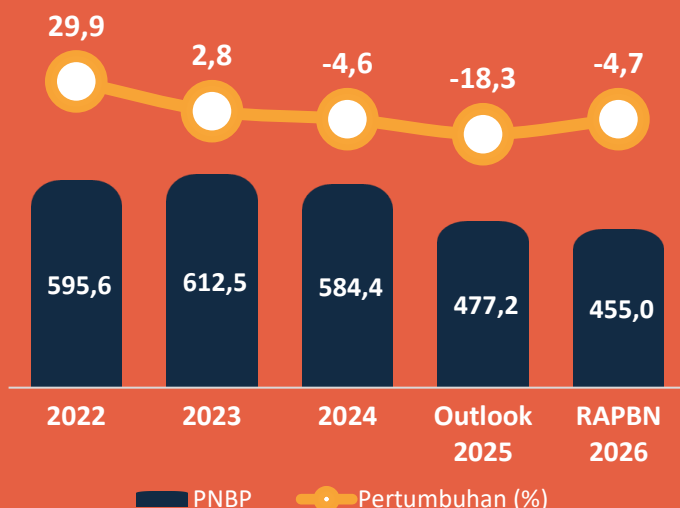


PPN dibebaskan untuk bahan makanan	Insentif untuk sektor pendidikan	Insentif untuk sektor transportasi	Insentif untuk sektor kesehatan	Insentif untuk mendukung UMKM	Tax Holiday dan Tax Allowance untuk mendorong investasi
Rp 82,1 T	Rp 27,2 T	Rp 43,8 T	Rp 16,7 T	Rp 104,7 T	Rp 7,7 T
• PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dll.) Rp55,0T. • PPN dibebaskan atas barang hasil perikanan dan kelautan sebesar Rp27,1T.	• PPN dibebaskan atas jasa pendidikan sebesar Rp25,1T • PPN dibebaskan atas buku Pelajaran sebesar Rp542,7M • Insentif-insentif lainnya sebesar Rp1,5T	• antara lain: • PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum Rp24,9T • Tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp6.4T	• PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis sebesar Rp15,1T • Insentif-insentif lainnya sebesar Rp1,3T	• antara lain : • PPN tidak dipungut untuk UMKM sebesar Rp64,5T • PPh Final UMKM sebesar Rp32,8T	• Selama periode 2020 s.d. Mei 2025, Tax Holiday berhasil menarik realisasi investasi sebesar Rp441T dan Tax Allowance sebesar Rp34T



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 455,0 T



Proyeksi PNPB 2026 dipengaruhi

- Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ dan harga komoditas utama, seperti minyak bumi dan minerba
- Optimalisasi *lifting* migas
- Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dan SIMBARA sektor minerba
- Peningkatan kualitas layanan K/L

Kebijakan Umum PNPB 2026

- Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan, serta pengawasan PNPB guna meningkatkan kepatuhan, serta optimalisasi PNPB, termasuk pemanfaatan aset/BMN.
- Penguatan sinergi antarinstansi termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).



Rp236,6 T

Pendapatan Sumber Daya Alam

Dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US\$ dan harga minyak bumi, serta optimalisasi *lifting* migas.



Rp1,8 T

Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan

Optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas didukung oleh upaya perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.



Rp118,3 T

PNPB Lainnya

- ✓ Penjualan Hasil Tambang dan DMO dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi dan minerba.
- ✓ Optimalisasi PNPB K/L dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan pengawasan, pengelolaan aset BMN, serta peningkatan sinergi antarinstansi.



Rp98,3 T

Pendapatan Badan Layanan Umum

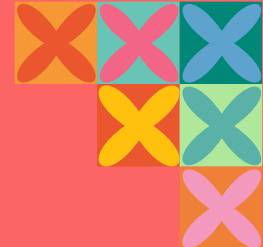
- ✓ Pendapatan BLU sawit dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas sawit.
- ✓ Pendapatan BLU layanan didukung oleh digitalisasi layanan, penguatan sinergi dan transformasi infrastruktur BLU, optimalisasi *idle cash*, inovasi skema pembiayaan, serta kemudahan akses layanan BLU





Pembiayaan Anggaran





Pembiayaan Anggaran



Kebijakan Pembiayaan, a.l.

- ✓ mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman
- ✓ memberdayakan *Special Mission Vehicle* (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU), serta sinergi dengan BPI Danantara
- ✓ memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian
- ✓ meningkatkan ketahanan fiskal melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien
- ✓ meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMI

Tantangan Pembiayaan Utang, a.l.

- ✓ Volatilitas dan pengetatan likuiditas pasar keuangan global
- ✓ Potensi *capital outflow* dari *emerging market*
- ✓ Potensi pelemahan nilai tukar
- ✓ Potensi kenaikan imbal hasil SBN

Tantangan Pembiayaan Investasi, a.l.

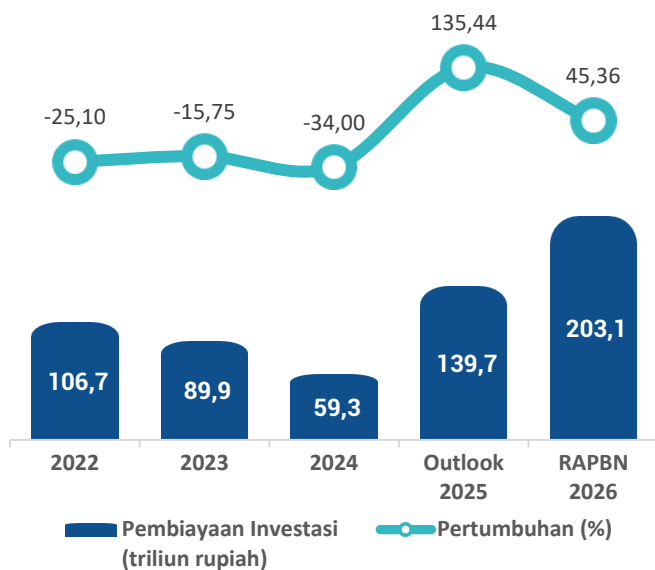
- ✓ dampak positif sosial dan ekonomi masih perlu dioptimalkan
- ✓ *good corporate governance* perlu terus dijaga
- ✓ peran BLU masih perlu ditingkatkan
- ✓ kualitas SDM perlu ditingkatkan
- ✓ akses kesehatan dan penyediaan perumahan yang belum optimal
- ✓ peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar K/L, pemerintah daerah, BPI Danantara/BUMN, BLU, dan badan/lembaga lainnya yang perlu dikuatkan



Pembiayaan Investasi

Rp203,1 T

Kepada BUMN dan BLU, Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, Investasi Pemerintah oleh BUN, dan Investasi Lainnya



Kebijakan

- ✓ meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
- ✓ memberdayakan peran BLU dan SMV sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
- ✓ mendorong penguatan sinergi antara BPI Danantara, BUMN, BLU, SMV, dan badan/ lembaga lainnya
- ✓ mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan



BUMN dan BLU
(Rp 41,5 T)

Investasi kepada BUMN ditujukan untuk mendukung program FLPP. Investasi kepada BLU digunakan untuk pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN, investasi pada Dana Abadi di Bidang Pendidikan, dan investasi pada Dana Bersama Penanggulangan Bencana



Organisasi/ LKI/BUI
(Rp2,0 T)

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota, dan mempertahankan/ meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*)



Investasi Non-Permanen
(Rp51,8 T)

Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) ditujukan untuk mendukung sektor perumahan melalui Program FLPP, sektor pangan melalui investasi kepada Perum BULOG, dan sektor lainnya berupa investasi kepada PT SMI melalui pemanfaatan Dana *Repayment* Pinjaman PEN Daerah.



Investasi Lainnya
(Rp111,8 T)

Investasi lainnya terdiri dari pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi, dan cadangan pembiayaan lainnya sebagai *fiscal buffer* untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan program prioritas Pemerintah lainnya.



Penerimaan Kembali Investasi
Rp4,0 T

Terdapat proyeksi penerimaan kembali investasi dari Pinjaman PEN Daerah yang dialokasikan sebagai modal tambahan bagi PT SMI untuk menyediakan fasilitas pembiayaan publik dengan tingkat bunga konsesional.

Pembiayaan Lainnya

Rp60,4 T



Pemerintah mengalokasikan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp60,0 triliun dan alokasi Hasil Pengelolaan Aset (HPA) sebesar Rp0,4 triliun.

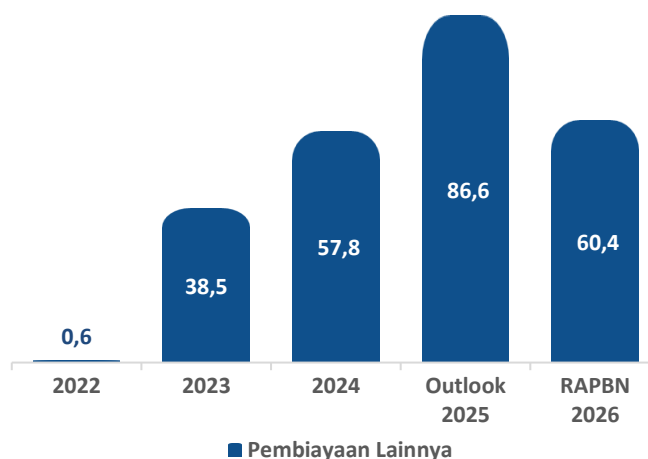
SAL dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal (*fiscal buffer*), khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian domestik dan global



Pembiayaan lainnya juga berasal dari HPA yang merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi aset-aset bank eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks. Bank Dalam Likuidasi.



APBN 2026 Sehat, Akseleratif, dan Suportif



Pengelolaan Risiko Fiskal

Tahun 2026

Risiko perubahan kondisi ekonomi makro, risiko implementasi program dan kebijakan, risiko kewajiban kontinjensi, risiko neraca konsolidasi sektor publik, risiko kesinambungan fiskal, dan risiko fiskal daerah perlu diantisipasi sehingga pelaksanaan APBN berjalan optimal.

RISIKO

MITIGASI, antara lain:



Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko yang berasal dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN, antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah; serta perubahan pada nilai aset dan kewajiban pada neraca

- Optimalisasi pendapatan negara
- Peningkatan kualitas belanja negara
- Pengendalian rasio utang
- Analisis sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.
- Alokasi dana cadangan sebagai bantalan (*cushion*).



Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

Risiko yang timbul akibat diambilnya atau diputuskannya suatu kebijakan dan/atau program yang berpotensi menyebabkan tambahan beban APBN, antara lain menurunnya pendapatan dan/atau bertambahnya beban belanja dan pembiayaan Pemerintah

- Peningkatan kualitas belanja *mandatory spending*
- Peningkatan ruang fiskal melalui penggalan potensi penerimaan negara
- Peningkatan pembiayaan non-APBN, dengan skema kerjasama Pemerintah dan pihak swasta
- Menjaga defisit sesuai dengan kaidah fiskal.
- Memprioritaskan sumber pembiayaan *domestic* dan *creative financing*.



Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Risiko yang timbul akibat adanya kewajiban dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah apabila faktor atau keadaan risiko sebagai pemicunya terjadi

- Peningkatan efektifitas analisis dan monitoring kewajiban penjaminan dan penugasan Pemerintah
- Penguatan tata kelola dan manajemen risiko jaminan sosial
- Penyelesaian penanganan tuntutan hukum dengan prinsip kecermatan sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik
- Penguatan tata kelola dan manajemen risiko jaminan sosial dan lembaga Keuangan tertentu
- Optimalisasi strategi penyediaan dana pembiayaan risiko bencana dan transfer risiko



Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Risiko berkaitan aset dan kewajiban negara secara agregat yang dipicu oleh perubahan kebijakan, serta faktor ekonomi makro domestik dan internasional yang akan mengganggu kesinambungan negara.

- Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan serta tata Kelola fiskal
- Pengendalian utang Pemerintah pusat dan BUMN
- Penguatan strategi pengendalian risiko nilai tukar dan aset valas



Risiko Kesinambungan Fiskal

Risiko yang bersumber dari tingkat kemampuan Pemerintah dalam mengelola APBN secara efektif dan efisien secara berkelanjutan

- Menguatkan efektifitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas belanja pusat dan daerah
- Menjaga pembiayaan tetap inovatif, *prudent* dan *sustainable*
- Menguatkan daya tahan dan mitigasi risiko ang kolaboratif



Risiko Fiskal Daerah

Risiko yang bersumber dari kondisi fiskal Pemerintah Daerah yang berpotensi mempengaruhi kondisi fiskal Pemerintah Pusat

- Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah
- Kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja
- Penguatan kelembagaan

Advertorial

RAPBN 2026

Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Disusun oleh
Tim Kementerian Keuangan

Editor:
Dit. Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Direktorat Jenderal Anggaran

Ide dan Konsep
Bayu Segara
Reza Ibnu Prakoso

Data yang digunakan dalam buku ini

2022-2024: Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP)
2025 : *Outlook APBN*
2026 : RAPBN





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
www.anggaran.kemenkeu.go.id